

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar telah menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) 2021.

Rencana Kerja (RENJA) ini menyajikan perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk 1 (satu) tahun kedepan yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang merupakan aspirasi dari masyarakat . Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini mengacu pada rancangan Akhir RKPD, mengacu pada RENSTRA . Rancangan akhir RKPD menjadi acuan dalam peumusan program, kegitan, indikator kinerja dan dana inddikatif.

Diharapkan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2021 ini dapat menjadi pedoman Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan .

Blitar , Juni 2020

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR**



IMAM MUSLIM, S.Pd.M.Si

Pembina Tk 1

NIP. 19640727 198303 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU	5
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu.....	5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	17
2.4. Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.....	21
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	25
BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	30
BAB V PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 2 ayat (2), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan tahunan. Sejalan dengan ketentuan dimaksud, sebagai petunjuk operasionalnya diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan , Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , Serta Tata Cara Perubahan Rencana Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dimana dalam Pasal 11 ayat (3) bahwa penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu , dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Sebagai dokumen perencanaan SKPD, maka Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar 2021 mengacu pada RKPD Kota Blitar Tahun 2021, Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2016 - 2021, hasil evaluasi pelaksanaan progam dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Dengan demikian, Renja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar

3. Instrumen bagi pemerintah daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah
4. Instrumen bagi pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat.

1.2 Landasan Hukum

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2021 berdasarkan pada :

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 tahun 2005);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2007);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dirubah dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2013 tentang Perubahan Kedua

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
 8. Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Blitar Nomor 2 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Blitar Tahun 2016 – 2021(Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2017 Nomor6) ;
 10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi , Tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
 11. Peraturan Walikota Blitar Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2021;
 12. Peraturan Walikota Blitar Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2016 – 2021 di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program regional dan sektoral, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja adalah sebagai berikut :

- Merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021;
- Agar program dan kegiatan yang disusun terfokus dan tepat sasaran;
- Sebagai bahan masukan/landasan guna menyusun kegiatan tahun anggaran 2021.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud Dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR TAHUN LALU

- 2.1 Hasil Pelaksanaan RENJA Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
- 2.3 Isu – isu penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
- 2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2020

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN LALU

2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu

Untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020, maka dilakukan pengukuran dan evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dengan cara menghitung penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan/program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dimaksud mencakup penetapan indikator kinerja serta penetapan capaian indikator. Selanjutnya dilakukan evaluasi kinerja dari pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan serta laporan capaian keuangan yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta perkiraan capaian realisasi target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 dan tahun 2020 diuraikan dalam table 2.1 Dan table 2.2 sebagai berikut “

Tabel 2.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Blitar dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target RENSTRA pada tahun 2021		Target Kinerja dan Anggaran 2020		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran 2020		Tingkat Capaian Kinerja dan realisasi Anggaran			
			K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		Kinerja	Rp	Kinerja	Rp		
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					K	Rp
1	2	3	4		5		6		7		8		9		12		13			
	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100 %	%		100	%	1.584.563.736	25%	120.660.410	360.624.545	0	0	0%	481.284.955	0%	30%			
	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	179	macam	294.545.834	29	mcm	53.327.800	24	18.558.500	0	8.607.000	0	0	0	0	24	27.165.500	83%	51%
		Jumlah barang cetakan yang tersedia	47	macam cetakan		5	mcm cetakan		0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	40%	
		Jumlah lembar penggandaan	6.000	lembar		0	lmbr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
		Jumlah bahan bacaan yang tersedia	18	bahan bacaan		1	bahan bacaan		1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	200%	
		Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	3.152	dos		448	dos		35	0	136	0	0	0	0	0	171	0	38%	

		Jumlah macam makanan dan minuman tamu				2	macam		0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	100%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsolidasi regional dan nasional yang diikuti	215	rakor	1.013.841.024	26	rakor	134.645.000,00	10	44.838.907	2	0	0	0	0	0	12	44.838.907	46%	33%
	Penyediaan Jasa Perkantoran	jumlah tenaga pelayanan perkantoran yang tersedia	12	tenaga pelayanan	547.120.000	0	Org	116.320.000,00	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Jumlah dokumen arsip pencatatan sipil yang dikelola	4	macam dok		4	macam dok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	jumlah rekening yang terbayarkan	24	rekening	3.383.361.408	4	rekening	1.278.161.736,00	4	57.263.003	0	352.017.545	0	0	0	0	4	409.280.548	100%	32%
		jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	76	unit		16	unit		0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	25%	
		jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	48	macam		8	macam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
		jumlah jenis perlatan rumah tangga kantor yang tersedia	120	macam		18	mcm		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
		Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang tersedia	23	macam		4	macam		1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	50%	

		Jumlah jenis peralatan gedung kantor yang terpelihara	43	macam		9	macam		1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	22%	
		jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	22	unit		4	unit		4	0	4	0	0	0	0	0	8	0	100%	
		jumlah gedung kantor yang terehab	2	unit		1	unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
		jumlah bangunan kantor yang terpelihara	7	unit		1	unit		1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	100%	
		Jumlah mebeleur yang tersedia	10	macam		2	macam		0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	100%	
		Jumlah gedung kantor yang terbangun				1	unit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	jumlah jenis dokumen ketatalaksanaan yang disusun (ikm)	3	dok	5.000.000	1	dok	1.609.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	Penyusunan Laporan Keuangan	jumlah jenis dokumen laporan keuangan yang tersusun	6	dok	3.000.000	1	dok	500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH	tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	10000%	%	410.550.000	100	%	41.780.000		0		7.215.000	0	0			7.215.000	0%	17%	
	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	21	event	360.500.000	3	event	31.240.000	0	0	1	7.000.000	0	0	0	0	1	7.000.000	33%	22%

	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	10	publikasi	50.050.000	1	publikasi	10.540.000	0	0	0	215.000	0	0	0	0	0	215.000	0%	2%
	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	Prosentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100	%	50.526.300	100	%	1.250.000	33%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	jumlah jenis dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun (renja, dpa, dppa, lkjip, lkpj, lppd)	38	dok	50.526.300	6	dok	1.250.000	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	33%	0%
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK	persentase kepemilikan dokumen kependudukan	92	%	4.263.149.854	90	%	767.936.904	118.427.995	160.770.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	jumlah dokumen pindah datang dan pendataan penduduk yang diterbitkan	12.500	berkas	1.813.702.700	2500	dok	144.793.600	1005	0	660	21.506.300	0	0	0	0	1665	21.506.300	67%	15%
		jumlah pelayanan dokumen kependudukan secara mobiling	234	pelaynan		0	pelayanan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
		jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang dikirim	30.000	dok		9000	dok		1480	0	3954	0	0	0	0	0	5434	0	60%	

	Pelayanan Identitas Penduduk	jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	27000	kk	1.010.112.154	9000	kk	344.348.304	769	0	1864	139.263.800	0	0	0	0	2633	139.263.800	29%
			24000	KTP		8000	ktp		3383	0	1913	0	0	0	0	0	5296	0	66%
			15000	KIA		5000	kia		1487	0	528	0	0	0	0	0	2015	0	40%
		jumlah peserta rakor dan monev pelayanan di kecamatan dan kelurahan	105	orang		40	peserta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAK)	jumlah blangko dan formulir pendaftaran penduduk yang tersedia			1.439.335.000			278.795.000	0	118.427.995	0	0	0	0	0	0	0	118.427.995	0%
		Blanko KK	59620	set		8000	lmbr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Blanko F1.01	23000	set		7000	set		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Blanko F1.05	33000	set		6000	set		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Blanko F1.15	10000	set		4000	set		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Blanko F1.16	10000	set		4258	set		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Blanko F1.21	12000	set		0	set		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		kertas scurity	15000	lembar		4000	lmbr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Balangko pindah datang				8000	lmbr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Balangko pendataan penduduk rentan				1000	lmbr		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		jumlah macam atk untuk pelayanan ktp-el yang tersedia	21	macam		3	macam		0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	100%
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	prosentase kepemilikan dokumen pencatatan sipil	92	%	871.710.700	90	%	211.016.500		0	73.842.400	0	0				73.842.400		

	Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, dan Perubahan Nama	jumlah dokumen akta kelahiran,akta kematian,perubahan nama dan pembatalan akta yang diterbitkan	26400	dok	374.708.700	4000	dok	71.652.200	1219	0	753	31.733.900	0	0	0	0	1972	31.733.900	49%	44%
		jumlah akta pencatatan sipil yang dikelola	10800	dok		12000	dok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
		jumlah dokumen akta pencatatan sipil yang dikirim	1050	dok		400	dok		0	0	45	0	0	0	0	0	45	0	11%	
	Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak	jumlah dokumen akta perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak yang diterbitkan	240	dok	113.002.000	40	dok	39.365.300	32	0	0	19.006.500	0	0	0	0	32	19.006.500	80%	48%
		jumlah cetak blangko kutipan akta kematian, register akta kematian, fomytir sptjm akta kelahiran	13200	lmbr		4400	lmbr		0	0	4400	0	0	0	0	4400	0	100%		
	Pelayanan Pencatatan Sipil (DAK)	jumlah blangko dan formulir pencatatan sipil yang tersedia	41500	lmbr	384.000.000	23000	lmbr	99.999.000	0	0	23000	23.102.000	0	0	0	0	23000	23.102.000	100%	23%
		jumlah pelayanan dokumen akta kelahiran secara keliling	150	pelayanan		80	pelayanan		14	0	15	0	0	0	0	29	0	36%		
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	prosentase validitas data kependudukan	92	%	4.176.694.122	90	%	999.785.000	99%	111.582.812	283.937.500	0	0	99%	395.520.312					

	Peningkatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	jumlah opd/lembaga/instansi yang memanfaatkan	14	OPD	315.194.000	4	OPD	71.010.500	0	5.394.700	0	0	0	0	0	0	0	5.394.700	0%	8%
		jumlah dokumen ikm yang tersusun	4	dok		1	dok		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
		jumlah surveylanc iso	4	kali		0	kali		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	
	Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	umlah peserta sosialisasi administrasi kependudukan	6600	orang	608.907.650	1320	peserta	118.400.000	0	29.580.300	0	32.499.500	0	0	0	0	0	62.079.800	0%	52%
		Jumlah publikasi adminduk dimedia cetak				1	macam		0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	100%	
	Pengelolaan Informasi dan Data Kependudukan	jumlah buku nik yang diterbitkan	8576	buku	1.398.690.000	1716	buku	539.039.500	0	28.880.400	858	169.446.000	0	0	0	0	858	198.326.400	50%	37%
		jumlah buku profil kepedudukan persemester yang diterbitkan	1120	buku		200	buku				100									
		jumlah macam pengelolaan informasi dan data kependudukan	4	macam		2	macam		0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	100%	
		jumlah buku data kependudukan yang diterbitkan	300	buku		200	buku				100									
		jumlah aplikasi yang di abdate	7	macam		2	macam		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	

	Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK)	jumlah macam pengembangan siak	4	macam	1.853.902.472	1	macam	271.335.000	0	47.727.412	1	81.992.000	0	0	0	0	1	129.719.412	100%	48%
		jumlah peserta rapat teknis SIAK DWH dan SIPAK	180	org		180	org		0	0	180	0	0	0	0	180	0	100%		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi. Faktor – faktor dimaksud antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong :

- a. Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang telah sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2008 sehingga menjadi lebih ramping dan kaya fungsi dengan diisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Mekanisme kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berorientasi kepada pencapaian kinerja.
- c. Adanya hubungan kerja yang baik dan komitmen yang kuat antara pimpinan dan staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam menciptakan suasana kerja yang kondusif sehingga menimbulkan motivasi kerja yang tinggi.
- d. Pola kerja yang sistemik dan terjadwal sehingga dapat memberikan hasil yang optimal, efektif dan efisien

2. Faktor Penghambat :

- a. Secara kuantitatif aparat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar belum memadai, namun secara kualitatif masih perlu terus ditingkatkan, terutama kemampuan teknis masing - masing staf, utamanya kemampuan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan kemampuan dibidang IT.
- b. Masih terdapatnya kebijakan pembangunan daerah yang seringkali tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
- c. Masih belum optimalnya penerapan pelayanan online melalui aplikasi yang sudah disediakan yakni SIPAK online
- d. Belum adanya pepadanan data dengan Lembaga terkait seperti KUA sebagai penyedia data Nomor Akta Perkawinan, Dinas Pendidikan sebagai penyedia data pendidikan terakhir, Dinas Kesehatan sebagai penyedia data golongan darah sehingga belum bisa dilakukan update dan validasi data base kependudukan .
- e. Sarana peralatan perekaman KTP el yang ada di kecamatan sudah tidak dapat digunakan secara optimal.

Dari analisis diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) tahun 2020 dapat dikatakan berhasil walaupun masih dijumpai hambatan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi dalam pelaksanaannya dimasa mendatang perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat diperoleh hasil yang lebih baik. Hal tersebut dapat dijelaskan secara lebih rinci dalam tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel. 2.2
Pencapaian Pelayanan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Blitar

NO	Indikator	SPM/Standart Nasional	Target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil				Realisasi Capaian				Poyeksi
			2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7					
	1. Aspek Pelayanan Umum										
1	Cakupan penerbitan kartu keluarga	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	98,75%	98,30%	96,03%	99,52%	99,73%
3	Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	90%	80%	85%	87%	90%	86,65%	92,14%	95,42%	97,02%	99,33%
4	Cakupan penerbitan kutipan akta kematian	70%	50%	55,5%	60%	70%	100%	100%	100%	100%	100%
5	IKM	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK	BAIK		BAIK	BAIK	BAIK	BAIK

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Terbitnya Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan , memberikan kewenangan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat pada unit kerja yang menangani Administrasi Kependudukan di provinsi dan kabupaten/kota (Pasal 83A). Pasal tersebut merupakan kesepakatan politik nasional antara Presiden dengan DPR RI yang menempatkan sebagai aturan khusus (*lex specialis*) dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sebagai tindaklanjut dimaksud maka telah diterbitkan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 76 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Pada unit Kerja yang menangani Administrasi Kependudukan. dan yang lebih utama ada beberapa hal yang mendasar tentang Perubahan Regulasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu “ Penggratisan Biaya Cetak Dokumen Kependudukan bagi penduduk yang tertib lapor tepat waktu “ dan Pemberlakuan asas domisili bagi pencatatan peristiwa kependudukan ,sehingga diterbitkan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar merupakan unsur pelayanan pemerintahan daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Identifikasi Isu-isu Strategis Terkait dengan Tugas dan Fungsi
Dispendukpencapil

No.	Tugas dan Fungsi	Permasalahan
1.	Perumusan kebijakan teknis urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	a. Kualitas data dan informasi untuk mendukung pelayanan publik dibidang Kependudukan dan Pencatatan sipil belum optimal
2.	Pengoordinasian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang adminduk	Belum konsistennya kebijakan pemerintah pusat terhadap sarana dan prasarana penunjang pelayanan adminduk di daerah
3.	Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang adminduk	Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM)
4.	Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	a. Belum adanya tenaga pengelola arsip dokumen kependudukan dan pencatatan sipil b. Masih belum optimalnya penerapan pelayanan online
4.	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.	

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil diatas, maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yaitu :

1. Dalam penyusunan perencanaan kebijakan teknis administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dalam hal peningkatan layanan , maka harus didukung data dan informasi yang valid. Informasi terkait Kebijakan administrasi kependudukan dari pusat tidak hanya bidang terkait yang mengetahuinya , namun data dan informasi itu harus diketahui oleh seluruh Karyawan dan karyawan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil khusus nya di bagian penyusunan program. Dengan adanya data dan informasi kebijakan kependudukan yang valid maka dalam penyusunan perencanaan prinsip money follow programme dapat terwujud. Yang artinya program dan kegiatan strategis yang

memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini dilakukan untuk mencapai manfaat yang lebih jelas , sehingga menjadi pedoman kebijakan pendanaan untuk pelaksanaan tahun 2021. Disamping itu, dengan adanya pemahaman terkait kebijakan – kebijakan pelayanan adminduk oleh seluruh ASN diharapkan ada kesadaran masing – masing individu muncul rasa memiliki dan berkomitmen bersama dalam mewujudkan peningkatan kualitas layanan.

2. Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus didukung oleh seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar. Oleh karena itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil perlu meningkatkan konsolidasi, koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar
3. Dokumen arsip catatan sipil merupakan dokumen kependudukan dan identitas yang sangat vital bagi seorang penduduk dalam kedudukannya sebagai seorang WNI. Dimana dokumen tersebut setiap waktu terus bertambah sehingga perlu adanya ruang khusus untuk dokumen arsip catatan sipil. Dan juga perlu adanya petugas pengelola arsip catatan sipil.
4. Belum meratanya kualitas SDM pengelola database SIAK dan SDM perencana. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan maka diperlukan SDM yang professional. Upaya yang dilakukan yakni dengan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petugas layanan. Selain itu petugas yang berkompeten dibidang data di kirim untuk mengikuti pelatihan – pelatihan di pusat terkait pengolahan data kependudukan .
5. Dalam upaya optimalisasi pelayanan dibidang administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara online perlu adanya upaya – upaya untuk memfasilitasi masyarakat yang tidak dapat mengakses pelayanan online melalui SIPAK online yakni dengan menyediakan kios layanan mandiri. Sehingga pelayanan online dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan terwujud pelayanan yang membahagiakan bagi masyarakat .

Sedangkan Identifikasi isu strategis (lingkungan eksternal) terkait dengan dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar dapat disampaikan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 2.4
Identifikasi Isu Strategis terkait Dinamika Nasional, Provinsi dan Kota Blitar

No.	Isu Strategis			
	Nasional	Provinsi Jawa Timur	Kota Blitar	Dispendukpe ncapil
1.	<p>a. Tuntutan terhadap pelayanan adminduk yang membahagiakan yaitu cepat, akurat, mudah dan gratisa dengan pelayanan online</p> <p>b. Perwujudan data dan dokumen kependudukan sebagai dasar dalam pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;</p>	Database kependudukan yang belum akurat	Tuntutan masyarakat yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan good governance yang mencakup transparansi dan keterbukaan informasi public , pelayanan public dan penguatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan	<p>a.Kuarang update data kependudu kan sesuai dengan perkembangan penduduk</p> <p>b.Belum optimalnya pemanfaata n dokumen kependudu kan dan pencatatan sipil</p>

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan tersebut pada tabel Identifikasi isu-isu strategis terkait dengan dinamika baik di Tingkat Nasional, Jawa Timur, dan Kota Blitar diatas, maka beberapa hal yang perlu dilaksanakan kedepan adalah :

1. Mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga/OPD dalam pelayanan public. Yang mana pada saat ini masih rendahnya aksesibilitas dan pemanfaatan data kependudukan. Untuk itu maka perlu untuk lebih intens dalam melakukan sosialisasi terkait pemanfaatan data kependudukan bagi penyelenggaraan pelayanan public Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Blitar memberikan pelayanan dan Fasilitas bagi OPD/Lembaga yang memerlukan data kependudukan untuk pelayanan public melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS)
2. Sebagai salah satu program dari 4 program GISA yakni Program Sadar Melayanai Administrasi Kependudukan Menuju Masyarakat yang

Bahagia maka melalui kegiatan inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan pelayanan adminduk online melalui <https://sipak.blitarkota.go.id/> . Untuk itu yang harus dilakukan adalah :

- a) peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;
 - b) peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk;
 - c) peningkatan kualitas pelayanan adminduk.
3. Data kependudukan yang update sesuai peristiwa / perkembangan penduduk. Dengan melakukan kerjasama dengan Lembaga/ OPD yang berkaitan dengan jenis elemen data penduduk untuk melakukan pemadanan data, sehingga data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akurat sesuai dengan peristiwa perkembangan penduduk

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah menentukan 6 (enam) Prioritas Pembangunan Daerah, yaitu :

1. Percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan kualitas kesehatan utamanya bagi ibu dan anak, serta kualitas Pendidikan masyarakat
3. Percepatan kinerja pelayanan persampahan dan air minum yang layak serta dukungan bagi ketahanan energi dan sumberdaya air
4. Penguatan produktivitas dan daya saing daerah yang berorientasi pada ekonomi kreatif dan inovatif
5. Penimngkatan nilai – nilai social masyarakat yang berumber pada nilai agama dan kearifan local , serta dukungan kesuksesan pelaksanaan pemilu
6. Pemantapan profesionalisme aparatur yang mendukung pelayanan pelayanan public dan reformasi birokrasi

Dari 6 (enam) prioritas pembangunan dimaksud, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditunjuk sebagai penanggung jawab atau pelaksana prioritas pembangunan yang ke enam yakni Pemantapan profesionalisme aparatur yang mendukung pelayanan pelayanan public dan reformasi birokrasi dengan sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan

public dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang dijabarkan dalam program dan kegiatan. Disamping itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berkewajiban mendukung pelaksanaan RPJMD Kota Blitar 2016 – 2020. Sehubungan dengan hal dimaksud, dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah, program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilaksanakan penyesuaian sebagaimana dalam tabel dibawah ;

Tabel 2.5
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2021
Kota Blitar

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Program Pelayanan Perkantoran	Dispenduk Capil	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	778.567.319	Program Pelayanan Perkantoran	Dispenduk Capil	Persentase kecukupan pelayanan perkantoran	100%	2.008.465.975	
2	Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja Dan Keuangan	Dispenduk Capil	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	3.500.000	Program Peningkatan Pengembangan system pelaporan capaian kinerja Dan Keuangan	Dispenduk Capil	Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan OPD yang tersusun tepat waktu dan sesuai dengan aturan	100%	1.617.500	
3	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Dispenduk Capil	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100%	83.050.000	Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah	Dispenduk Capil	Tingkat partisipasi perangkat daerah dalam agenda kota	100%	77.891.260	
4	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispenduk Capil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	91%	951.000.000	Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispenduk Capil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan	91%	1.272.071.198	
5	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dispenduk Capil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan	91%	254.700.000	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Dispenduk Capil	Persentase kepemilikan dokumen pencatatan	91%	634.591.715	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			sipil					sipil			
6	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	dispenduk capil	Persentase validitas data kependudukan	100%	750.000.000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	dispenduk capil	Persentase validitas data kependudukan	100%	1.650.226.456	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga berasal dari para pemangku kepentingan baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi, maupun OPD dalam hal penyediaan panduan program dan kegiatan serta fasilitasi sinkronisasi dan integrasi program. Rumusan usulan program dan kegiatan dimaksud dijabarkan dalam tabel 2.5 sebagai berikut :

Tabel. 2.6
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar
Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi kebijakana administrasi kependudukan warga masyarakat	Kelurahan	Terlaksanannya sisialisasi kebijakan kependudukan	150 orang	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta Rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah

Sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2020, tema pembangunan sesuai dengan RTP tahun 2020 adalah "*Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural*". Dari tema pembangunan tersebut dituangkan dalam agenda pembangunan dan diturunkan ke dalam prioritas program dan kegiatan. Adapun prioritas pembangunan nasional yang harus didukung oleh daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sasaran meningkatkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dengan melalui salah satu unsur yakni pengendalian penduduk dan tata kelola kependudukan, dengan sasaran percepatan cakupan administrasi kependudukan dan integrasi system administrasi kependudukan.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- 1) penyediaan data oleh Pemerintah Daerah harus dikoordinasikan dan dikonsolidasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.
- 2) pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan kegiatan:
 - peningkatan kapasitas SDM di bidang adminduk;

- peningkatan sarana dan prasarana pelayanan adminduk;
 - peningkatan kualitas pelayanan adminduk.
- 3) fasilitasi dan koordinasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil provinsi dan kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lain untuk pemanfaatan database kependudukan.

3.2. Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategik, yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi PD untuk mencapai dan melaksanakannya dalam tahun tertentu. Adapun indikator tujuan dan sasaran dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.1
Indikator Tujuan dan Formula Perhitungan

INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN
Indeks Kepuasan Masyarakat Target pada tahun 2021 :BAIK	Hasil survey kepuasan masyarakat dibidang kependudukan dan pencatatan sipil dengan hasil BAIK Penjelasan : Hasil survey kepuasan masyarakat yang dimaksud adalah survey kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Tabel. 3.2
Sasaran, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

No	Tujuan	Indikator	Target 2021	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Program	Kegiatan	Rp.
1	Meningkatnya kualitas pelayanan public di bidang kependudukan dan pencatatan sipil	Survey Kepuasan Masyarakat	Baik	Meningkatnya kualitas pelayanan Adminduk	Rata - rata Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan	92%	Program Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Pelayanan Identitas Penduduk	653.574.754
								Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	319.159.600
								Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAK)	299.336.844
					Rata - rata Persentase penduduk yang memiliki dokumen pencatatan sipil	92%	Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, dan Perubahan Nama	396.891.715
								Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinan , Perceraian , Pengakuan , Pengesahan dan Pengangkatan Anak	115.300.000
								Pelayanan Pencatatan Sipil (DAK)	122.400.000

No	Tujuan	Indikator	Target 2021	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2020	Program	Kegiatan	Rp.
2				Meningkatnya data kependudukan yang akurat	Persentase Peningkatan Validitas Data Kependudukan	0,0020 %	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Peningkatan kerjasama dan inovasi pelayanan kependudukan	200.000.000
								Pengelolaan Informasi Dan Data Kependudukan	1.040.365.300
								Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK)	199.459.000
								Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	210.402.156

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai, maka ditentukan Indikator kinerja. Indikator kinerja dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya misinterpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek – aspek yang relevan.

Selanjutnya, program dan kegiatan – kegiatan diatas diuraikan beserta kerangka pendanaan sebagaimana tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tahun 2021 Dan Prakiraan Maju Tahun 2022

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
2.		WAJIB PELAYANAN NON DASAR			5.644.864.104,00				5.927.107.309,20		
2.06		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			5.644.864.104,00				5.927.107.309,20		
2.06	01.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			5.644.864.104,00				5.927.107.309,20		
2.06	01.	01	PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN	Persentase Kecukupan Pelayanan Perkantoran		100 %	2.008.465.975,00		100 %	2.108.889.273,75	
2.06	01.	01	01	Pengelolaan Administrasi Perkantoran	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Kota Blitar	29 macam	80.010.000,00		29 macam	84.010.500,00
					Jumlah jenis barang cetakan		6 macam			6 macam	
					Jumlah lembar penggandaan		2000 lembar			2000 lembar	
					Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang tersedia		3 bahan bacaan			3 bahan bacaan	
					Jumlah dos/kotak mamin yang tersedia		816 dos			816 dos	
2.06	01.	01	02	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	Kota Blitar	50	275.000.000,00		50	288.750.000,00
2.06	01.	01	03	Penyediaan Jasa Perkantoran	Jumlah dokumen arsip pencatatan sipil yang dikelola	Kota Blitar	4 macam	116.320.000,00		4 macam	122.136.000,00
2.06	01.	01	04	Penyusunan Perencanaan, Pengelolaan dan Pelaporan Sarana Prasarana Perkantoran	Jumlah rekening yang terbayarkan	Kota Blitar	4 rekening	1.535.018.475,00		4 rekening	1.611.769.398,75
					Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya		16 unit			16 unit	
					Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia		8 macam			8 macam	
					Jumlah Mebeleur yang tersedia		3 macam			3 macam	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF
		Jumlah mebeleir yang terpelihara		2 macam				2 macam	
		Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia		18 macam				18 macam	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi		4 macam				2 macam	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang tersedia		7 macam				5 macam	
		Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpelihara		3 macam				3 macam	
		Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara		4 macam				4 macam	
		Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang terpelihara		4 unit				4 unit	
		Jumlah gedung kantor yang terbangun		1 unit				0 unit	
		Jumlah gedung yang gerpelihara		1 unit				1 unit	
2.06	01.01.05	Penyusunan dan Pelaporan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	Kota Blitar	1 dokumen	1.617.500,00			1 dokumen	1.698.375,00
2.06	01.01.06	Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Blitar	2 dokumen	500.000,00			2 dokumen	525.000,00
2.06	01.02	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DAERAH		100 %	77.891.260,00			100 %	81.785.823,00
2.06	01.02.01	Pengelolaan Administrasi dan Kelengkapan Kepegawaian	Kota Blitar	3 event	67.351.260,00			3 event	70.718.823,00
2.06	01.02.02	Pengelolaan publikasi dan informasi Perangkat Daerah	Kota Blitar	2 Publikasi	10.540.000,00			2 Publikasi	11.067.000,00
2.06	01.03	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		100 %	1.617.500,00			100 %	1.698.375,00
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat(SKM)		Baik				Baik	
2.06	01.03.01	Penyusunan dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Kota Blitar	6 Dokumen	1.617.500,00			6 Dokumen	1.698.375,00
2.06	01.05	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK		92 %	1.272.071.198,00			92 %	1.335.674.757,90

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		
2.06	01.05	01	Pelayanan Pindah Datang dan Pendataan Penduduk	Jumlah dokumen pindah datang, pindah keluar dan pendataan penduduk yang diterbitkan	Kota Blitar	2500 dokumen	319.159.600,00			2500 dokumen	335.117.580,00
				Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang dikirim ke alamat pemohon		10000 Dokumen				10000 Dokumen	
2.06	01.05	02	Pelayanan Identitas Penduduk	Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan	Kota Blitar	9000 KK	653.574.754,00			9000 KK	686.253.491,70
				Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan		8000 KTP				8000 KTP	
				Jumlah dokumen pendaftaran penduduk yang diterbitkan		5000 KIA				5000 KIA	
				Jumlah peserta rakor dan monev pelayanan di kecamatan dan kelurahan		40 orang				40 orang	
2.06	01.05	03	Pelayanan Pendaftaran Penduduk (DAK)	Jumlah blanko dan formulir Pendaftaran penduduk yang tersedia	Kota Blitar	6000 F1.01	299.336.844,00			2000 F1.01	314.303.686,20
				Jumlah blanko dan formulir Pendaftaran penduduk yang tersedia		6000 F1.05				0 F1.05	
				Jumlah blanko dan formulir Pendaftaran penduduk yang tersedia		2500 F1.15				0 F1.15	
				Jumlah blanko dan formulir Pendaftaran penduduk yang tersedia		2500 F1.16				0 F1.16	
				Jumlah blanko dan formulir Pendaftaran penduduk yang tersedia		2500 F1.21				0 F1.21	
				Jumlah macam ATK untuk pelayanan KTP-el yang tersedia		18 Macam				0 Macam	
2.06	01.06		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	Persentase kepemilikan akta pencatatan sipil		92 %	634.591.715,00			92 %	666.321.300,75
2.06	01.06	01	Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran, Kematian, dan Perubahan Nama	Jumlah dokumen akte kelahiran kematian, perubahan nama dan pembatalan akta kelahiran yang diterbitkan	Kota Blitar	4000 Dokumen	396.891.715,00			4000 Dokumen	416.736.300,75
				Jumlah dokumen penacatatan sipil yang dikirim		350 Dokumen				300 Dokumen	
2.06	01.06	02	Pelayanan Kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian, Pengakuan, Pengesahan dan Pengangkatan Anak	Jumlah dokumen akta perkawinan, perceraian, pengakuan, pengesahan, dan pengangkatan anak yang diterbitkan	Kota Blitar	200 dokumen	115.300.000,00			200 dokumen	121.065.000,00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF
		Jumlah cetak blanko kutipan akta kematian, register akta kematian, formulir SPTJM akta kelahiran		5000 lembar				5000 lembar	
2.06	01.06	03 Pelayanan Pencatatan Sipil (DAK)	Jumlah dokumen Akta Perkawinan , Perceraian , Pengakuan , Pengesahan dan Pengangkatan Anak yang diterbitkan	Kota Blitar	40 dokumen	122.400.000,00		40 dokumen	128.520.000,00
			Jumlah blanko kutipan akta kematian, register akta kematian, formulir SPTJM akta kelahiran yang tersedia		1500 lembar			1500 lembar	
			Jumlah pelayanan keliling		80 pelayanan keliling			80 pelayanan keliling	
2.06	01.07	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Validitas data kependudukan		100 %	1.650.226.456,00		100 %	1.732.737.778,80
2.06	01.07	01 Peningkatan Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Kependudukan	Jumlah OPD/lembaga/instansi yang bekerjasama dalam memanfaatkan pelayanan data	Kota Blitar	12 OPD	200.000.000,00		12 OPD	210.000.000,00
			Jumlah dokumen SKM yang disusun		1 dokumen			1 dokumen	
			Jumlah surveilnace ISO		1 kali			0 kali	
2.06	01.07	02 Sosialisasi Kebijakan Kependudukan (DAK)	Jumlah peserta Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	(*)Pembinaan terkait administrasi kependudukan untuk Ketua RW dan Ketua RT Kelurahan Bendogerit Kecamatan Sananwetan Kelurahan Bendogerit Kelurahan Bendogerit	2000 peserta	210.402.156,00		2000 peserta	220.922.263,80
			Jumlah publikasi administrasi kependudukan di media cetak/elektronik		2 jenis publikasi			2 jenis publikasi	
2.06	01.07	03 Pengelolaan Informasi dan Data Kependudukan	Jumlah macam pengelolaan informasi dan data kependudukan	Kota Blitar	2 macam	1.040.365.300,00		2 macam	1.092.383.565,00
			Jumlah buku NIK yang diterbitkan		1716 buku			1716 buku	
			Jumlah aplikasi yang di abdate		2 Aplikasi			2 Aplikasi	
			Jumlah buku profil kependudukan yang diterbitkan		200 buku			200 buku	
			Jumlah buku data kependudukan yang diterbitkan		200 buku			200 buku	

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021				CATATAN PENTING	RENCANA TAHUN 2022					
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF				
2.06	01.	07	04	Pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK)	Jumlah macam pengembangan SIAK	Kota Blitar	1 macam	199.459.000,00			1 macam	209.431.950,00	
					Jumlah peserta rapat teknis dan sosialisasi SIAK data warehouse		240 orang				240 orang		
TOTAL												5.644.864.104,00	5.927.107.309,20

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar memberikan gambaran tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 sebagai penjabaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar 2021. Rencana ini disusun setelah mempertimbangkan dengan seksama hasil evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2019 dan 2020.

Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Renja tahun 2021 ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Rencana Kerja tahun 2021 ini selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

Akhirnya, Renja ini diharapkan dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar tahun 2021. Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras, oleh sumber daya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar, sehingga hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi upaya Pemerintah Kota Blitar dalam rangka mewujudkan good governance melalui perencanaan pembangunan yang mengedepankan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Blitar, Juni 2020

**Plt. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BLITAR**



IMAM MUSLIM, S.Pd.M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19640727 198303 1 002

